

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Ngargoyoso, September 2024

PIL. CAMAT NGARGOYOSO



NIP. 196705031989031010

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 16
TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 34
TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. landasan Hukum I-2

 1.3. Maksud dan Tujuan I-5

 1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I) II-1

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 Triwulan II (Semester I) II-1

 2.2. Analisis Kinerja KECAMATAN NGARGOYOSO II-30

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO II-30

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024 III-1

 3.1. Tujuan dan Sasaran III-1

 3.2. Program dan Kegiatan III-2

 3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-11

 3.4. Dana Indikatif III-12

BAB IV PENUTUP IV-1

 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. IV-1

 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024	II-1
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024	II-13
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	II-19
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024	II-23
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2024	II-25
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024	III-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024	II-10
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2024	II-11
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2024	II-22
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2024	III-11

BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat- Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan

kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34);
 31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
 32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah Ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur KECAMATAN NGARGOYOSO dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Tahun 2024.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra KECAMATAN NGARGOYOSO

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan KECAMATAN NGARGOYOSO, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran KECAMATAN NGARGOYOSO.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

NAGARGOYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO tahun 2023 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja KECAMATAN NGARGOYOSO

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan KECAMATAN NGARGOYOSO berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing KECAMATAN NGARGOYOSO, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan

evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Ngargoyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja KECAMATAN NGARGOYOSO.

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024**

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).

Pada sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

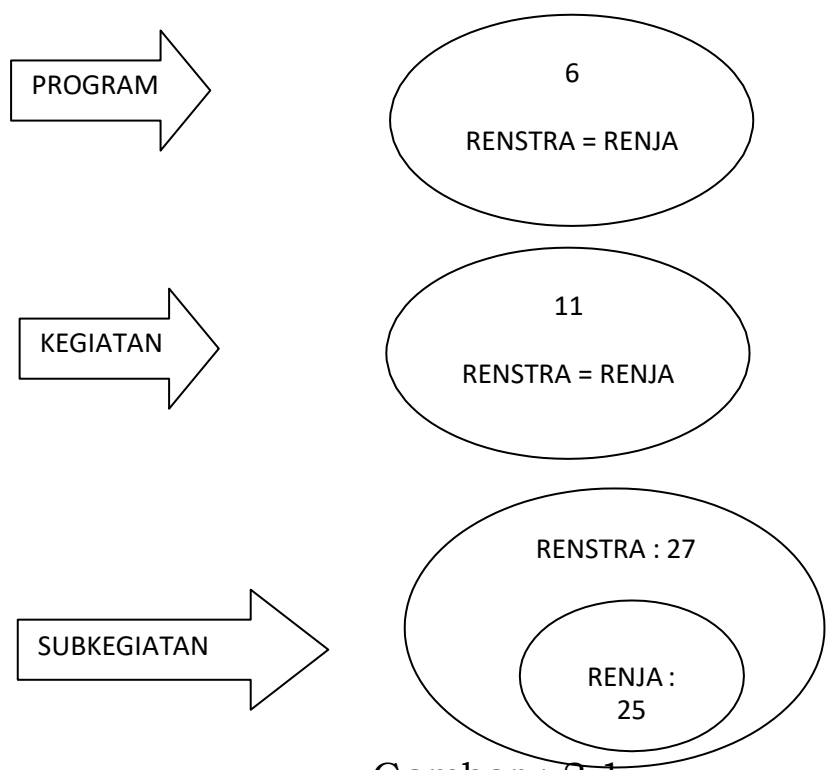
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7				Unsur Kewilayahan			2.560.100		2.457.289,14		102.810,86
7.01				Kecamatan			2.560.100		2.457.289,14		102.810,86
7.01				Kecamatan			2.560.100		2.457.289,14		102.810,86
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96%	2.200.000	96%	2.095.640,69	=	104.359,31
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.000	100%	3.493,5	=	506,5
7.01	01.2	01	000 1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.000	3 dokumen	2.216,8	=	-216,8
7.01	01.2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.000	3 laporan	1.276,7	=	723,3
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.757.060	90%	1.651.600,19	=	105.458,81
7.01	01.2	02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.757.060	15 orang/bulan	1.651.600,19	=	105.458,81
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	137.590	100%	175.384	=	-37.794
7.01	01.2	06	000 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.000	12 paket	5.898,4	=	-898,4
7.01	01.2	06	000 2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di disediakan	12 paket	14.500	12 paket	21.743,3	=	-7.243,3
7.01	01.2	06	000 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di disediakan	12 paket	7.000	12 paket	10.891	=	-3891
7.01	01.2	06	000 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	12 paket	3.000	12 paket	5.714,4	=	-2714,4
7.01	01.2	06	000 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.400	12 dokumen	1.320	=	1080

7.01	01.2	06	000 9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	105.190	12 Laporan	127.700	=	-22.510
7.01	01.2	06	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	500	12 dokumen	2.117	=	-1.617
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	58.000	100%	42.000	=	16.000
7.01	01.2	07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000	1 unit	25.000	=	5.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2Unit	16.000	-	-	=	16.000
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	12.000	3 unit	17.000	>	- 5.000
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	185.400	100%	164.420	=	20.980
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	109.200	1 laporan	109.800	=	-600
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.800	1 laporan	22.700	=	-3.100
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	50.400	1 laporan	31.920	=	18.480
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	57.950	100%	58.743	=	-793
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	40.000	4 unit	41.955,5	=	-1.955,5
7.01	1.02	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	7.950	0		=	7.950
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10.000	2 unit	16.787,5	=	-6.787,5
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1	900	85,1	1.263,5	=	-363,5
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tldak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1	900	85,1	1.263,5	=	-363,5
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	900	1 laporan	1.263,5	=	-363,5
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	127.200	100 %	106.800	=	20.400
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	127.200	100%	106.800	=	20.400

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	127.200	12 Laporan	106.800	=	20.400
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	115.000	100 %	135.710	=	-20.710
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	115.000	100 %	135.710	=	-20.710
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	70.000	70 orang	43.435	=	26.565
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	45.000	25 Laporan	92.275	=	-47.275
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	50.000	100 %	36.675	=	13.325
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	50.000	100 %	36.675	=	13.325
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	6.000	5 lembaga kemasyarakatan	3.750	=	2.250
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.000	12 Laporan	32.925	=	11.075
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	67.000	100 %	81.200	=	-14.200
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	67.000	100 %	81.200	=	-14.200
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	63.600	12 Dokumen	78.400	=	-14.800
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	3.400	12 Dokumen	2.800	=	-600

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(27/25) \times 100\% = 108\%$ (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 2 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.
2 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah :
 - a. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD ;
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: karena menyesuaikan alokasi anggaran

dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD

2) Kesesuaian indikator dan target

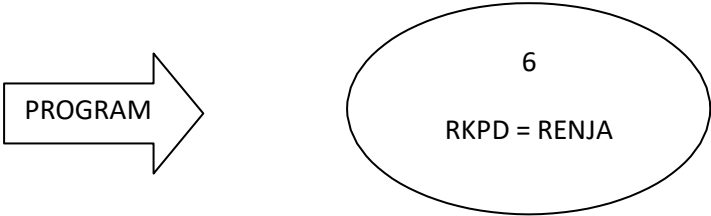
- Indikator dan Target di Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja Konsisten sama

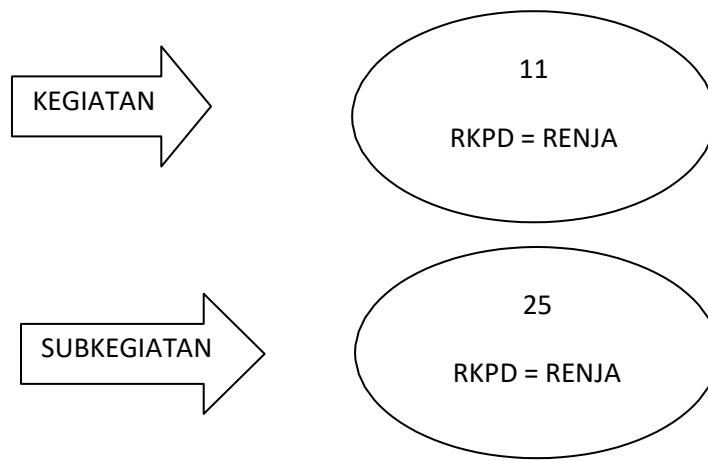
3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.457.289.137.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.560.100.000.- Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Ngargoyoso.
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.22.510.000

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2024, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :





Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan
RKPD dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
 - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (11 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
 - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
 - Program konsistensi indikator dan target
 - Kegiatan konsistensi indikator dan target
 - Sub kegiatan konsistensi indikator dan target
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Terdapat kesamaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 2.467.289.137,-

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7				Unsur Kewilayanan			2.457.289,14		2.457.289,14	=	0,00
7.01				Kecamatan			2.457.289,14		2.457.289,14	=	0,00
7.01				Kecamatan			2.457.289,14		2.457.289,14	=	0,00
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96%	2.095.640,69	96%	2.095.640,69	=	0,00
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	100%	3.493,5	=	0,00
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	=	0,00
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276,7	3 laporan	1.276,7	=	0,00
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.651.600,19	90%	1.651.600,19	=	0,00
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.651.600,19	15 orang/bulan	1.651.600,19	=	0,00
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	175.384	100%	175.384	=	0,00
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.898,4	12 paket	5.898,4	=	0,00
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangdi sediakan	12 paket	21.743,3	12 paket	21.743,3	=	0,00
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	10.891	12 paket	10.891	=	0,00
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.714,4	12 paket	5.714,4	=	0,00
7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.320	12 dokumen	1.320	=	0,00
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 Laporan	127.700	12 Laporan	127.700	=	0,00

7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	2.117	12 dokumen	2.117	=	0,00
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.000	100%	42.000	=	0,00
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25.000	1 unit	25.000	=	0,00
							-		-		

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	17.000	3 unit	17.000	=	0,00
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	164.420	100%	164.420	=	0,00
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	109.800	1 laporan	109.800	=	0,00
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	22.700	1 laporan	22.700	=	0,00
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	31.920	1 laporan	31.920	=	0,00
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	58.743	100%	58.743	=	0,00
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	41.955,5	4 unit	41.955,5	=	0,00
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	16.787,5	2 unit	16.787,5	=	0,00
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1	1.263,5	85,1	1.263,5	=	0,00
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1	1.263,5	85,1	1.263,5	=	0,00
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.263,5	1 laporan	1.263,5	=	0,00
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	106.800	100 %	106.800	=	0,00
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	106.800	100%	106.800	=	0,00
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	106.800	12 Laporan	106.800	=	0,00
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	135.710	100 %	135.710	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan OPemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	135.710	100 %	135.710	=	0,00
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	43.435	70 Orang	43.435	=	0,00
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	92.275	25 Orang	92.275	=	0,00
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	36.675	100 %	36.675	=	0,00
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	36.675	100 %	36.675	=	0,00
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	3.750	5 Lembaga kemasyarakatan	3.750	=	0,00
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	32.925	12 Laporan	32.925	=	0,00
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	81.200	100 %	81.200	=	0,00
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	81.200	100 %	81.200	=	0,00
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	78.400	12 Dokumen	78.400	=	0,00
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	2.800	=	0,00

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Renja Tahun 2024, yaitu terhadap APBD Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso dengan pagu APBD Tahun 2024. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

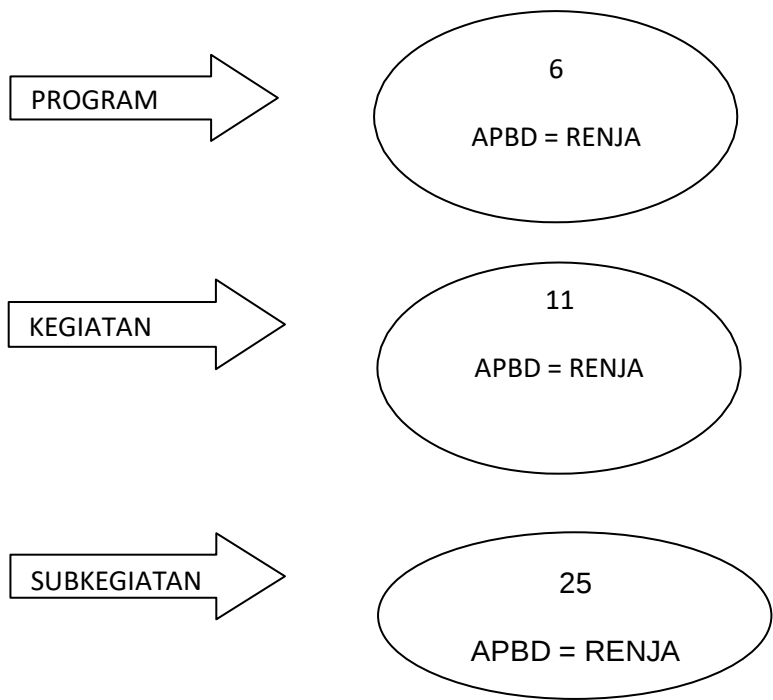
Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2		3	4	5
7				Unsur Kewilayanan		2.457.289,14	2.439.996,21	99,29%
7.01				Kecamatan		2.457.289,14	2.439.996,21	99,29%
7.01				Kecamatan		2.457.289,14	2.439.996,21	99,29%
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.095.640,69	2.012.102,77	96,01%
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.493,5	3.493,5	100,00%
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah		2.216,8	2.216,8	100,00%
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.276,7	1.276,7	100,00%
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.651.600,19	1.676.307,26	101,49%
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.651.600,19	1.676.307,26	101,49%
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		175.384	142.259,05	81,11%
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.898,4	5.898,4	100,00%
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		21.743,3	21.689,3	99,75%
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor		10.891	15.000	137,73%
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.714,4	6.234,4	109,09%
7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1.320	1.320	100,00%
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		127.700	90.000	70,47%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.117	2.117	100,00%
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		42.000	42.000	100,00%
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25.000	25.000	100%
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		17.000	17.000	100,00%
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.420	131.300	69,86%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2		3	4	5
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat		109.800	56.400	51,37%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		22.700	22.700	100,00%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		31.920	52.200	163,53%
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.743	58.743	100,00%
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		41.955,5	41.955,5	100,00%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		16.787,5	16.787,5	100,00%
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK		1.263,5	36.263,5	2870,08
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1.263,5	36.263,5	2.870,08
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1.263,5	36.263,5	2.870,08
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		106.800	143.700	134,55%
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		106.800	143.700	134,55%
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		106.800	143.700	134,55%
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		135.710	112.535	82,92%
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah		135.710	112.535	82,92%
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan		43.435	70.435	162,16%
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		92.275	42.100	45,62%
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		36.675	68.595	187,03%
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		36.675	68.595	187,03%
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		3.750	3.750	100%
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan		32.925	64.845	196,94%
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		81.200	66.800	82,26%
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		81.200	66.800	82,26%
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		78.400	64.000	81,63%
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2.800	2.800	100%

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2024 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100 % (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD);
2. Kesesuaian indikator dan target
 - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.457.289.137,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.439.996.210,- ada penurunan sebesar Rp. 17.292.927.- atau (0,70%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Baperlitbang Tahun 2024

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2024 Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.2.439.996.210,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7				Unsur Kewilayahan			2.439.996,21	1.317.396,71	53,08	50
7.01				Kecamatan			2.439.996,21	1.317.396,71	53.08	50
7.01				Kecamatan			2.439.996,21	1.317.396,71	53,08	50
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96%	2.012.102,77	1.174.254,96	57.17	50
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	0	0	0
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	0	0	0
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276.7	0	0	0
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.676.307,26	973.229,36	74,17	70
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.676.307,26	973.229,36	58,06	50
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	142.259,05	86.365,2	60,71	60
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ peneranganbangunan kantor yang sediakan	12 paket	5.898,4	1.069,9	18,14	50
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangdi sediakan	12 paket	21.689,3	4.316,9	19,90	50
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	15.000	2.468,4	16,46	50
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.234,4	1.300	20,85	50
7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.320	550	41,67	50

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	90.000	76.660	85.18	80
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	2.117	0,000	0,00	0
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.000	40.176,79	95,66	100
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25.000	23.951,79	95,81	100
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	17.000	16.225	95,44	100
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	131.300	56.005,11	42,65	50
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	56.400	23.500	41,67	50
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	22.700	10.755,11	47,38	50
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	1 laporan	52.200	21.750	41,67	50
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	58.743	18.478,5	31,46	30
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	41.955,5	18.478,5	44,04	50
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	16.787,5	0	0	0
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1	36.263,5	14.700	40,54	50
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1	36.263,5	14.700	40,54	50
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.263,5	14.700	40,54	50
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	143.700	60.050	41,79	50

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif	(Rp.000)	%	
							(Rp. 000)			
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	143.700	60.050	41,79	50
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	143.700	60.050	41,79	50
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	112.535	14.875	13,22	30
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	112.535	14.875	13,22	30
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	70.435	0	0	0
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	42.100	14.875	35,33	20
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	68.595	28.016,75	40,84	75
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	68.595	28.016,75	40,84	75
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakan	3.750	3.750	100	100
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	64.845	24.266,75	37,42	50
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	66.800	25.500	38,17	50
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	66.800	25.500	38,17	50
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	64.000	24.800	38,75	50
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	700	25	50

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.317.396.713,- atau 53,08%. Untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah/kota realisasi keuangan 57,17 %, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik realisasi anggaran 40,54%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar 40,84 %, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum realisasi anggran sebesar 41,79 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realiasasi anggaran sebesar 13,22 dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 31 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7.01				Kecamatan			
7.01				Kecamatan			
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai targetnya	96%	40
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	1. RKA 2024 2. DPA 2024 3. Renja 2025
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1. SAKIP 2. LPT
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	50
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	Gaji dan TPP 14 orang selama 6 bulan dan THR Th. 2024
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	55
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ peneranganbangunan kantor yang sediakan	12 paket	6 paket bulan Januari - juni 2024
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangdi sediakan	12 paket	6 paket buln Januari- Juni 2024
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	6 paket buln Januari- Juni 2024
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6 paket buln Januari- Juni 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	6 paket buln Januari-Juni 2024
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 laporan	6 paket buln Januari-Juni 2024
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	6 paket buln Januari-Juni 2024
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	100 %
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	100 %.
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50 %
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6 laporan buln Januari-Juni 2024
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan buln Januari-Juni 2024
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 laporan	6 laporan buln Januari-Juni 2024
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50 %
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Sudah dilaksanakan 50 %
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Dilaksanakan buan agustus
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1	Akhir Tahun
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1	akhirtahun
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Akhir tahun
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	50 %
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	50 %
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 laporan buln Januari-Juni 2024
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	30 %
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	30 %
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	Dilaksanakan bulan agustus
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	5

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	49
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	49
7.01	03.2	01	00 01	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	100 %
7.01	03.2	01	0 0 0 3	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 laporan buln Januari- Juni 2024
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	50
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	50
7.01	06.2	01	00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	16 dokumen buln Januari- Juni 2024
7.01	06.2	01	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	6 dokumen buln Januari-Juni 2024

2.2 Analisis Kinerja KECAMATAN NGARGOYOSO

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan KECAMATAN NGARGOYOSO berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing KECAMATAN NGARGOYOSO, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Ngargoyoso terlihat adanya :

- Adanya konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.457.289,137.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.481.996.210,- ada kenaikan sebesar 1,01%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 53,08%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan. Hal ini berarti sudah sesuai harapan disemester 1 sudah melebihi target 50 % karena adanya Kerjasama antar bidang sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
 - a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
 - b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya meskipun sudah konsisten.
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas KECAMATAN NGARGOYOSO juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbangcam) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Ngargoyoso Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2024		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	Kecamatan Ngargoyoso					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	65	=
	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	0	0	=
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71,11	71,11	=
	2) Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	0	0	=
	3) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,70	=

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso, 2024

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024, tersebut diatas. KECAMATAN NGARGOYOSO pada tahun 2024 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 11 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2024.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan KECAMATAN NGARGOYOSO di tahun 2024 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7				Unsur Kewilayahan			2.439.996,21		2.639.688,52	199.692,31	8%
7.01				Kecamatan			2.439.996,21		2639.688,52	199.692,31	8%
7.01				Kecamatan			2.439.996,21		2.639.688,52	199.692,31	8%
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96%	2.012.102,77	96%	2.210.310,1	198.207,33	9%
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	100%	3.493,5	0,00	0%
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	0,00	0%
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276.7	3 laporan	1.276.7	0,00	0%
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.676.307,26	90%	1.753.999,57	77.692,31	5%
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.676.307,26	14 orang/bulan	1.753.999,57	77.692,31	5%
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	142.259,05	100%	144.174,1	1.915,05	1%
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.898,4	12 paket	5.898,4	0,00	0%
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	21.689,3	12 paket	21.689,3	0,00	0%
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	15.000	12 paket	15.000	0,00	0%
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.234,4	12 paket	6.234,4	0,00	0%
7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.320	12 dokumen	1.320	0,00	0%
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	90.000	12 laporan	91.915	1.915	2%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	2.117	12 dokumen	2.117	0,00	0%
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.000	100%	91.700	49.700	118%

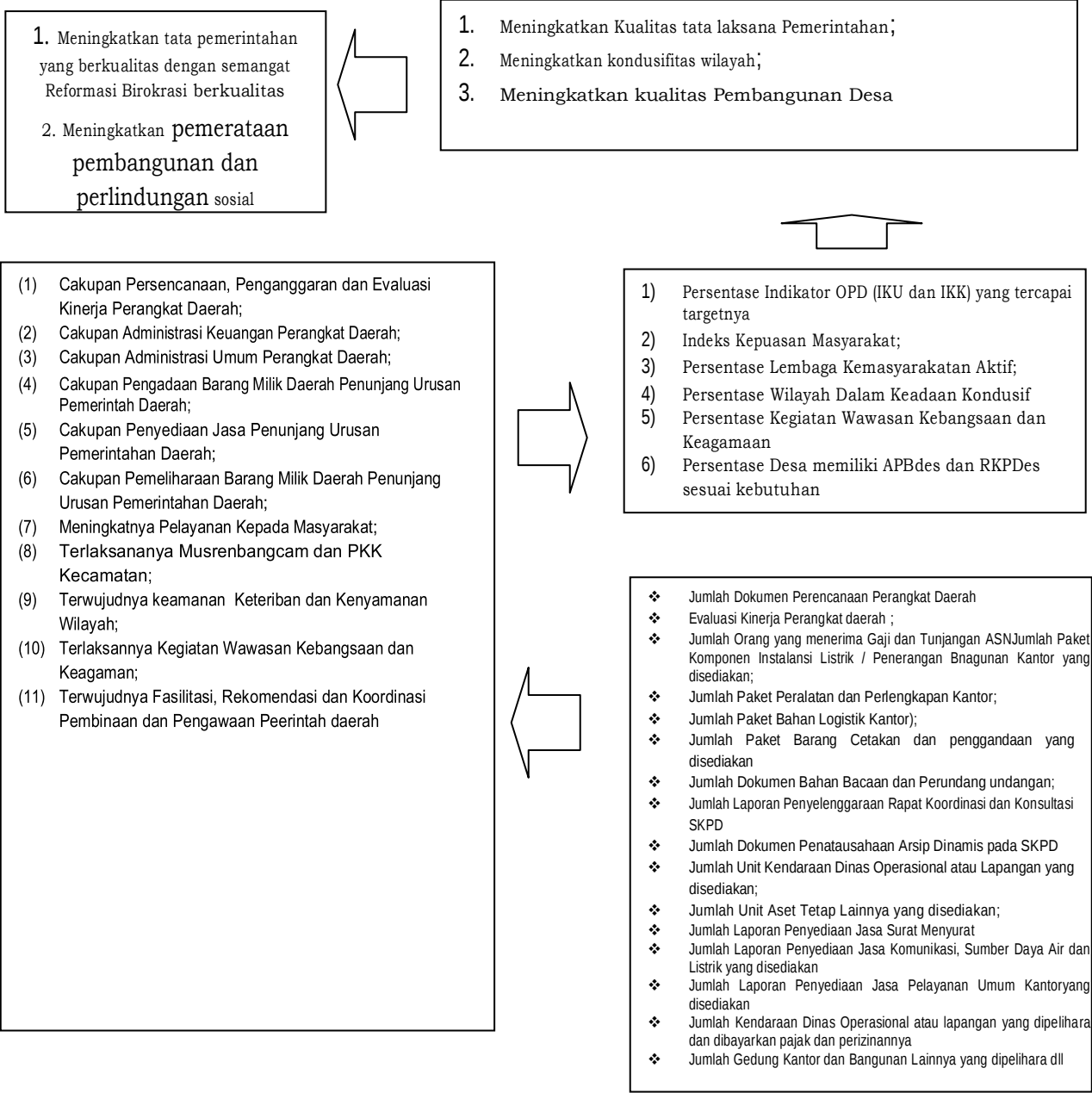
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.000	100%	91.700	49.700	118%
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25.000	1 unit	25.000	0,00	0%
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit			49.700	49.700	100 %
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	17.000	3 unit	17.000	0,00	0%
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	131.300	100%	133.200	1.900	1,4%
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	56.400	12 laporan	56.400	0,00	0%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	22.700	12 laporan	24.800	10.200,00	38%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	1 laporan	52.200	12 laporan	52.200	0,00	0%
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	58.743	100%	83.743	25.000	43%
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	41.955,5	4 unit	41.955,5	0,00	0%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	16.787,5	2 unit	41.787,5	25.000	149%
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1	36.263,5	85,1	36.263,5	0,00	0%
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1	36.263,5	85,1	36.263,5	0,00	0%
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.263,5	1 laporan	36.263,5	0,00	0%
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	143.700	100 %	143.700	0,00	0%
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	143.700	100%	143.700	0,00	0%
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	143.700	12 Laporan	143.700	0,00	0%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	112.535	100 %	110.660	-1.875	-1,67%
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	112.535	100 %	110.660	-1.875	-2%
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	70.435	70 Orang	68.560	-1.875	3%
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	42.100	25 Orang	42.100	0,00	0%
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	68.595	100 %	68.595	0,00	0%
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	68.595	100 %	68.595	0,00	0%
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	3.750	5 Lembaga kemasyarakatan	3.750	0,00	0%
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	64.845	12 Laporan	64.845	0,00	0%
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	66.800	100 %	70.160	0,00	0%
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	66.800	100 %	70.160	0,00	0%
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	63.600	12 Dokumen	67.360	0,00	0%
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	2.800	0,00	0%

3.2. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Ngargoyoso, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.1Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024

3.3. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	11	11	11
3	Subkegiatan	25	25	26
4	Jumlah Dana	2.457.289.137	2.481.996.210	2.639.688.521

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso, 2024

Perubahan Renja 2024 direncanakan :

- 1) Ada penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan PNS, karena pada saat APBD penetapan ada kekurang gaji dan tambahan penghasilan 14 orang PNS di Kecamatan Ngargoyoso
- 2) Ada penambahan 1 subkegiatan yaitu : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya, berupa belanja modal pembelian 2 (dua) personal Komputer untuk seksi tata pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan sosial dan 9 (Sembilan) buah meja rapat dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.700,-
- 3) Ada penambahan dana sebesar Rp. 81.875.000,- yang terutama karena:
 - a. Adanya tambahan anggaran dari kabupaten sebesar Rp. 80.000.000,-
 - b. Adanya honor THL baru dan diberikan honOr sebesar Rp. 1.120.000,- selama 3 bulan
 - c. Adnya penambahan anggaran untuk sub kegiatan penyedian jasa komunikasi, listrik dan air sebesar Rp. 1.900.000,- dikarenakan pada APBD penetapan baru dianggarkan 11 bulan
 - d. Untuk pembelian Meja Aula dan Rehabilitasi ruang aula
 - e. Sesuai petunjuk Inspektorat agar dianggarkan Biaya Trasnport untuk menghadiri perjalanan dinas dalam kota
- 4) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif yaitu Subkegiatan pergeseran anggaran pada sub kegiatn persatuan dan kesatuan bangsa Rp. 1.875.000,- makan

minum dan sewa kendaraan bermotor untuk karnaval digeserkan ke sub kegiatan lain karena kecamatan tidak melaksanakan kegiatan karnaval

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- 3) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Ngargoyoso, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

- 4) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI

